



**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

LAPORAN EVALUASI RKPD

Triwulan I Tahun 2023

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan limpahannya dalam memberi kekuatan Sehingga evaluasi dokumen hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kantor Camat Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023, pada kondisi Triwulan I ini Dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Melalui evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD untuk Triwulan I tahun Anggaran 2021, maka dilakukan terhadap 6 Program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Maka laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat Daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan Sinergi langkah-langkah kebijakan, program /kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dan seterusnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini, semoga laporan dapat dipergunakan bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tarusan, 30 Maret 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar hukum penyusunan	2
1.2 Maksud dan tujuan.....	3
1.3 Metodologi	4
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/ KEGIATAN RKPD DAN KENDALA.	5
A. URUSAN KEWILAYAHAN	5
1. Urusan Kewilayahan Kecamatan Koto XI Tarusan.....	5
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	6.
A. Kesimpulan hasil pelaksanaan Evaluasi RKPD Triw. I Tahun. 2023	
B. Rekomendasi.....	7
LAMPIRAN : Tabel Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kantor Camat Koto XI Tarusan KabupatenPesisir Selatan periode pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2023.	

BAB I

EVALUASI HASIL RKPD

KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan –tahapan kegiatan dengan melibat beberapa unsure pemegang kepentingan dalam rangka pemamfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam rangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan yang berkuwalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembanguan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Undang- undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ,dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Amanat Undang-undang tersebut dijabarkan kedalam peraturan pemerintah nomor tahun 08 tentang tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tersebut ,Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 62 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2021 yang ditetap kan dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2018 tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018 dan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 95 tahun 2018 tentang

penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2023.

Berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan ,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah,daerahsertatata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah,telah dibentuk tim penyusunan Laporan Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi irealisasi pencapaian target kegiatan ,penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, pembangunan yang ada ,isu-isu Strategis,serta pertimbangan sinergis antar sector pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2023.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang no 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kota kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1970 dan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679).
5. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengolahan keuangan Daerah.
6. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara pemerintah daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten /Kota .
7. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan ,tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,

9. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten pesisir selatan.
10. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tataruang wilayah kabupaten pesisir selatan tahun 2010 -2030.
11. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 yang telah di robah dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka Menengah daerah tahun 2016 -2021.
12. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 9 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2022.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan no 62 tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 95 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran. 2021.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari evaluasi hasil RKPD tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program /kegiatan prioritas daerah , indicator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023 .
- b. Menilai daya serap pencapaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input),keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2023 dan RPJMD tahun 2021-2026
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD tahun 2022.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD tahun 2022.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2022 ,yang merupakan tahun ke 2 dari pelaksanaan RPJMD tahun 2021 -2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagaimana masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.2 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan, penggunaan kategori interval ini akan membantu mengklafikasikan penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah.kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut.:

Kriteria Penilaian dan Interval Nilairrealisasi kinerja Evaluasi Hasil RKPD

NO	KRITERIA PENILAIAN	SIMBUL	INTERVAL NILAI
1	Sangat tinggi	ST	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	SangatRendah	SR	$\leq 50\%$

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023



BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD

A. URUSAN KEWILAYAHAN .

1. Urusan Kewilayahan Kecamatan Koto XI Tarusan.

Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2023 mempunyai 6 Program dan 10 Kegiatan, dengan Anggaran sebesar Rp. 2.146.556.501, Realisasi capaian kinerja output pelaksanaan Urusan Kewilayahan Kecamatan Koto XI Tarusan , dari keseluruhan program adalah Rp. 405.277.629,- dengan capaian RPJMD 25 % (sangat rendah) Dan capaian keuangan 25 % (sangat rendah).

BAB III

EVALUASI HASIL RKPD KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023



3.1 Kesimpulan hasil pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2023. Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

**Rekapitulasi Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kewilayahan Kec.Kt.XI Tarusan
Triwulan I Tahun 2023**

No	Urusan	Anggaran APBD 2023	Realisasi Anggaran S/D Triwulan I	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Kewilayahan .							
1	Urusan ke wilayahan kec.Kt.XI Tarusan.	2.146.556.687	405.277.629.-	94,25	ST	25	SR

Dari tabel di atas bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan Anggaran sampai Tanggal 31 Maret 2023 per urusan yang dilaksanakan di Kantor Camat Koto XI Tarusan, memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya yang sangat tinggi (ST).

Semua Urusan yang berada di Kewilayahan Kecamatan Koto XI Tarusan sampai pada Triwulan I ini sudah terlaksana dengan Baik dan Maksimal pencapaiannya.

LAMPIRAN

TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023 KONDISI TRIWULAN I

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2023**

OPD : Kecamatan Koto XI Tarusan

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub.kegiatan.	Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)	Target kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	SKPD Penanggung Jawab								
					6		7			8		9		10		11						12		13		14 = 7 +13		15 = 14/8	
					N	A	N	A		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
KEC. KOTO XI TARUSAN																													
I	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akurat dan Berkinerja	010001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12	4.343.200.000	12	2.805.726.854	12	2.134.970.150	3	405.277.629		-		-		#			3	405.277.629	3	3.211.004.483					
		010001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	10.000.000	12	5.393.000	12	16.950.750	3	633.140									3	633.140	3	6.026.140	0,250				
		010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5.000.000	2	2.557.000	2	8.132.150	0										2	-	2	2.557.000	1,000				
		010001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	5.000.000	9	2.836.000	9	8.818.600	3	633.140									3	633.140	3	3.469.140	0,333				
		010001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	2.892.500.000	12	2.191.754.354	12	1.877.793.945	3	359.755.071									3	359.755.071	3	2.551.509.425	0,250				
		010001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	2.850.000.000	12	2.143.325.725	12	1.829.956.687	3	353.605.071									3	353.605.071	3	2.496.930.796	0,250				

	0	0	0	2	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	2	42.500.000	1	2	48.428.629	1	2	47.837.258	3	6.150.000								3	6.150.000	3	54.578.629	0,250	
	0	0	0	2	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	2	221.200.000	1	2	114.182.466	12		131.108.005	3	26.605.774								3	26.605.774	3	140.788.240	0,250	
	0	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penrangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	2	5.500.000	1	2	2.364.780	12		3.039.624	3	-								3	-	3	2.364.780	0,250	
	0	0	0	2	0	0	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2		25.000.000	2		19.992.016	2		-										2	19.869.036		19.869.036	-	
	0	0	0	2	0	0	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1	2	34.500.000	1	2	9.697.270	1	2	15.115.611	3	2.610.965								3	2.610.965	3	12.308.235	0,250	
	0	0	0	2	0	0	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	2	22.800.000	1	2	11.064.900	1	2	10.335.270	3	700.000								3	700.000	3	11.764.900	0,250	
	0	0	0	2	0	0	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	2	7.200.000	1	2	3.600.000	1	2	3.600.000	3	800.000								3	800.000	3	4.400.000	0,250	
	0	0	0	2	0	0	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	2	43.200.000	1	2	9.120.000	1	2	23.100.000	3	6.273.909								3	6.273.909	3	15.393.909	0,250	
	0	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan rapat koord.dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	2	82.000.000	1	2	58.343.500	1	2	75.917.500	3	16.220.900								3	16.220.900	3	74.564.400	0,250	

		01	00	001	208		Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah		12	104.500.000	12	48.247.450	12	48.247.450	3	12.283.644					3	12.283.644	3	60.531.094	0,250				
		01	00	001	208	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	28.000.000																			
2		01	00	001	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	16.500.000	12	9.390.550	12	9.658.456	3	1.483.644						3	1.483.644	3	10.874.194	0,250			
		01	00	001	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Um um kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	50.000.000	12	38.856.900	12	50.175.531	3	10.800.000							3	10.800.000	3	49.656.900	0,250		
		01	00	001	209		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		12	32.000.000	12	58.384.584	12	60.870.000	3	6.000.000							3	6.000.000	3	64.384.584	0,250		
		01	00	001	209	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan.	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	45.000.000	12	43.544.584	12	37.260.000	3	3.750.000								3	3.750.000	3	47.294.584	0,250	
		01	00	001	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dioelihara	12	9.000.000	12	1.550.000	12	3.450.000	-	-								3	-	3	1.550.000	0,250	
		01	00	001	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	12	28.000.000	12	13.290.000	12	20.160.000	3	2.250.000								3	2.250.000	3	15.540.000	-	
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi	01	00	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12	221.000.000	12	72.300.000		-		-							3	-	3	72.300.000			

	dan pelayanan Publik	01	00	00	24	04	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat.		12	221.000.000	12	72.300.000	-	-						3	-	3	72.300.000			
		01	00	00	24	01	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	37	14.000.000	37	10.035.000	-	-							-	9	10.035.000			
		01	00	00	24	02	Pelaksanaan Urusa Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemeintahan		22.000.000			-	-												
		01	00	00	24	03	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg terkait dengan Kewenangan Lain yg dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	23	185.000.000	23	62.265.000	-	-								-	5	62.265.000		
3	Meningkatkan Pengalaman Nilai-Nilai Agama dalam kehidupan masyarakat	01	00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN		12	92.000.000	12	49.177.000	-	-							3	-	3	49.177.000		
		01	00	00	20	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.		12	92.000.000	12	49.177.000	-	-							3	-	3	49.177.000		
		01	00	00	20	01	Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	50	22.000.000	7	12.425.000	-	-								-	11	12.425.000		
		01	00	00	20	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masy. di Wilayah Kecamatan.	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	32	70.000.000	32	36.752.000	-	-								-	10	36.752.000		
4		01	00	00			PROGRAM KOORDINASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		12	18.500.000	12	16.779.000	-	-							3	-	3	16.779.000		

	01004201					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.		12	18.500.000	12	16.779.000	-							3	-	3	16.779.000					
	01004201					Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia ,tentara nasional Ind.dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.	Jumlah laporan hasil sinegritas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	10	10.500.000	10	12.797.000	-										2	12.797.000				
					02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	10	8.000.000	10	3.982.000	-										3	3.982.000				
5	01005					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		12	25.000.000	12	21.001.500	-								3	-	3	21.001.500				
	01005				201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah		12	25.000.000	12	21.001.500	-									3	-	3	21.001.500			
						03	Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	12	25.000.000	12	14.797.500	-												14.797.500		
						08	Pelaksanaan Tugas Forum Koord. Pimpinan di Kecamatan.	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12		12	6.204.000	-										3	6.204.000			
6	01006					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAHAN DESA		12	160.000.000	12	34.625.000	-								3	-	3	34.625.000				
	01006					Fasilitasi,Rekomendasi dan koord.Pimpinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.		12	160.000.000	12	34.625.000	-										23	34.625.000				

